

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

4.1.1.1 Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 86 Tahun 2023, Dinas Kesehatan memiliki fungsi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga bertugas memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan kesehatan di wilayah Kabupaten Ciamis. Dukungan administrasi, pengelolaan keuangan, perencanaan, serta penguatan sistem informasi kesehatan dilaksanakan melalui Sekretariat Dinas agar koordinasi dan tata kelola organisasi berjalan efektif

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada periode 2025 sampai dengan 2029 disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029. Pembangunan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan jangka menengah menuju pencapaian

visi Kabupaten Ciamis.

Visi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 adalah “Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan”, dalam bidang kesehatan berarti penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terunggul, termaju, paripurna, dan teratas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis."

Visi tersebut mengandung makna yang luas, mendalam dan sinergis dengan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, yaitu “CIAMIS NANJEUR 2045” Kabupaten Ciamis Religius, Maju, Tangguh dan Berkelanjutan. Pembangunan di Kabupaten Ciamis kedepan perlu dilakukan dengan mensinergikan semua modal dasar melalui pembangunan yang berbasis inovasi serta teknologi menuju Ciamis maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut :

1. Sinergi

Mengandung makna bekerja bersama atau bekerjasama, sebagai proses atau interaksi yang seimbang dan harmonis, sehingga dapat memberikan hasil optimal. Sinergi merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguatkan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan.

2. Maju

Mengandung makna harus senantiasa bergerak ke depan dan ke arah yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan ukuran-ukuran (indikator) yang telah ditetapkan.

3. Berkelanjutan

Mengandung makna bahwa pembangunan ditujukan untuk kepentingan

generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal dasar, harus tetap terjaga dan terpelihara. Membangun ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga dan memelihara keseimbangan dan keserasian lingkungan agar pembangunan dapat berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas;
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur;
4. Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik, Demokratis, dan Berkinerja Tinggi;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Manajemen Penanggulangan Bencana;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025–2029 ditetapkan 5 (lima) Tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kompetitif;
3. Terwujudnya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastuktur berkelanjutan untuk mendukung produktivitas daerah;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dengan mendorong partisipasi masyarakat dan adaptasi teknologi;

5. Terciptanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Dan sebagai arah pencapaian Tujuan Daerah tersebut di dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2025–2029 ditetapkan 14 Sasaran Daerah, yaitu :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat;
3. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Kerukunan Umat Beragama;
4. Terpeliharanya Nilai-Nilai Luhur dan Keberagaman Budaya Daerah;
5. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesenjangan Gender;
6. Meningkatnya Pertumbuhan Dan Produktivitas Perekonomian serta Daya Saing Daerah;
7. Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Daerah dan Ketahanan Pangan;
8. Meningkatnya kesempatan kerja dan kemudahan berusaha;
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan;
10. Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan adaptasi teknologi dalam pembangunan;
12. Meningkatnya Kinerja Pembangunan Desa;
13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
14. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana.

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban dalam upaya mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Diantara misi tersebut

yang paling berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Misi Ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik, Demokratis, dan Berkinerja Tinggi. Adapun penjelasan setiap kedua Misi tersebut yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Ciamis yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup aspek intelektual dan spiritual keagamaan, melalui peningkatan akses mutu pendidikan formal dan non-formal, perbaikan layanan kesehatan dasar yang terintegrasi, serta kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kehidupan yang layak dan produktif. Dengan SDM yang unggul dan adaptif, maka Kabupaten Ciamis diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat, cerdas, serta memiliki daya saing tinggi dalam mendukung transformasi daerah menuju kemajuan yang berkelanjutan

Misi 4: Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik, Demokratis dan Berkinerja Tinggi Pemerintah daerah yang kolaboratif, demokratis, dan berkinerja tinggi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Misi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi yang kokoh antara

pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga nonpemerintah, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Di tingkat lokal, kolaborasi antar desa didorong untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, di tingkat regional, Kabupaten Ciamis membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah lain guna memperluas jejaring, bertukar inovasi kebijakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya bersama.

Memperhatikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Tujuan Daerah yang selaras yaitu, Tujuan 1 “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing” dan Tujuan 4 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Masyarakat yang Partisipatif dan Adaptif terhadap Teknologi”, dengan Sasaran 1, yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dan Sasaran 10 yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif”.

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Dinas Kesehatan mengemban peran strategis sebagai regulator, pembina, dan pengendali sektor kesehatan di daerah. Sebagai instansi pemerintah daerah, Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, menyusun perencanaan pembangunan kesehatan, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

4.1.1.2 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

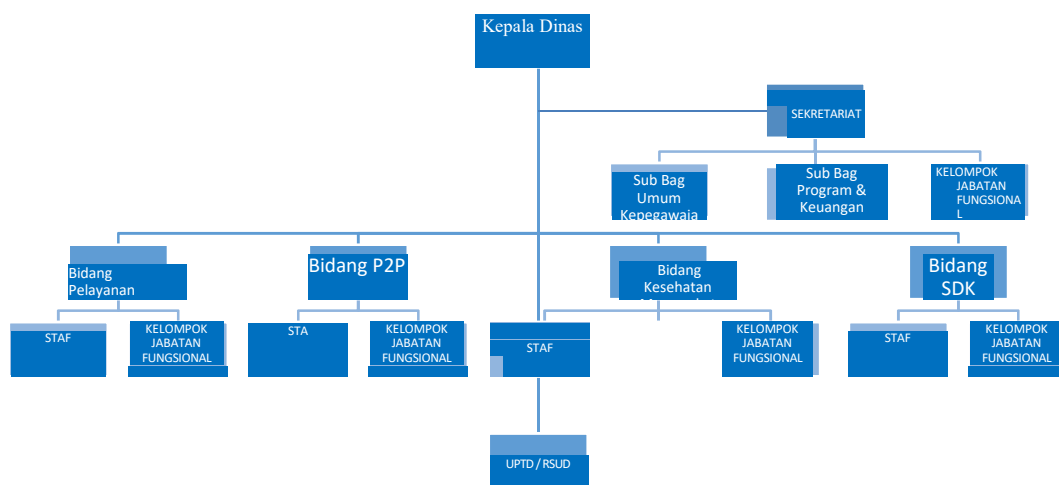
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 86 Tahun 2023. Struktur organisasi Dinas Kesehatan merupakan kerangka dasar yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penataan organisasi ini diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan secara optimal.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan telah dirancang untuk mencakup berbagai aspek pembangunan kesehatan, baik Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Keberadaan bidang-bidang teknis seperti Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan, menunjukkan adanya keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional maupun daerah. Selain itu, dukungan unit penunjang seperti Sekretariat dengan subbagian yang membidangi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, berperan penting dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, struktur organisasi Dinas Kesehatan telah mampu mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan, namun efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM, mekanisme koordinasi, dan kemampuan

adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian struktur, penguatan kapasitas, serta optimalisasi koordinasi lintas unit dan lintas sektor agar pelaksanaan fungsi layanan dapat lebih responsif, efektif, dan berkesinambungan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program / Perencana dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Bidang Kesehatan Masyarakat

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

7. Jabatan Fungsional

Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia

kesehatan;

- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data, arsip dan sistem informasi;

- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas;
- n. penyelenggaraan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
- q. dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perencanaan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;

- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tata laksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundangundangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan

dan keamanan kantor;

- g. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
- h. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik

lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering) dan situasi khusus lainnya;

- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD;
- i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi dan penyehatan lingkungan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

- b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD;
- m. pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit;

- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya dan

peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;

- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

9. UPTD

UPTD pada Dinas yaitu UPTD Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Rumah Sakit Daerah sebagai organisasi yang bersifat khusus dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan

secara profesional.

4.1.2 Deskripsi Responden

4.1.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 80 orang responden pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	26	32,5
2.	Perempuan	54	67,5
Jumlah		80	100

Sumber : Data Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu dari 80 orang responden tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 26 orang atau 32,5 persen dan sisanya sebanyak 54 orang atau sekitar 67,5 persen yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut kelompok umur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

4.1.2.2 Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	21–30 Tahun	11	13,7
2.	31– 40 Tahun	20	25
3.	41 – 50 Tahun	34	42,5
4.	>50 Tahun	15	18,8
Jumlah		80	100

Sumber : Data Penelitian, 2026

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah antara umur 41-50 tahun dengan jumlah 34 orang responden atau sekitar 42,5 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu antara umur 21-30 tahun yang hanya berjumlah 11 orang atau 13,7 persen saja.

4.1.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis .

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA/Sederajat	2	2,5
2.	D2/D3	18	22,5
3.	Sarjana	54	67,5
4.	Pascasarjana	6	7,5
Jumlah		80	100,00

Sumber : Data Penelitian, 2026

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan yang terbanyak adalah Sarjana dengan jumlah 54 orang responden atau sekitar 67,5 persen, sedangkan kualifikasi pendidikan yang paling sedikit jumlahnya yaitu

SMA/Sederajat yang hanya berjumlah 2 orang atau 2,5 persen saja.

Berdasarkan uraian dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diperoleh gambaran tentang profil dari responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

4.1.3 Analisis Hasil Penelitian

4.1.3.1 Pengujian Instrumen Penelitian

4.1.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment, yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel yang bersangkutan.

Kriteria pengujian validitas dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2001:123), yaitu suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Berdasarkan jumlah responden uji coba sebanyak 30 orang dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. Dengan demikian, setiap item pernyataan yang memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,361 dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

a. Uji Validitas Variabel X1 (Kemampuan Aparat)

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Variabel X1

No	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	X1.1	0,868	0,361	Valid
2	X1.2	0,833	0,361	Valid
3	X1.3	0,834	0,361	Valid
4	X1.4	0,869	0,361	Valid
5	X1.5	0,880	0,361	Valid
6	X1.6	0,835	0,361	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada variabel kemampuan aparat, seluruh item pernyataan menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kemampuan aparat memiliki tingkat validitas yang baik. Tingginya nilai korelasi pada masing-masing item menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk kemampuan aparat secara konsisten. Dengan demikian, seluruh item pada variabel ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam pengumpulan data penelitian.

b. Uji Validitas Variabel X2 (Prosedur Pelayanan)

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel X2

No	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	X2.1	0,798	0,361	Valid
2	X2.2	0,841	0,361	Valid
3	X2.3	0,891	0,361	Valid
4	X2.4	0,848	0,361	Valid
5	X2.5	0,845	0,361	Valid
6	X2.6	0,841	0,361	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel prosedur pelayanan, seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam variabel ini mampu mengukur konsep prosedur pelayanan secara tepat.

Nilai korelasi yang relatif tinggi pada setiap item menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup konsisten terhadap indikator prosedur pelayanan yang diukur. Dengan demikian, seluruh item pada variabel prosedur pelayanan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

c. Uji Validitas Variabel X3 (Sarana Prasarana)

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel X3

No	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	X3.1	0,894	0,361	Valid
2	X3.2	0,891	0,361	Valid
3	X3.3	0,876	0,361	Valid
4	X3.4	0,868	0,361	Valid
5	X3.5	0,890	0,361	Valid
6	X3.6	0,875	0,361	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel sarana prasarana memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan telah mampu merepresentasikan kondisi sarana dan prasarana secara valid.

Tingginya nilai korelasi antar item dan skor total menunjukkan bahwa variabel ini memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur persepsi responden terhadap fasilitas pelayanan. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel sarana prasarana dinyatakan valid.

d. Uji Validitas Variabel Y (Efektivitas Pelayanan Publik)

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Y

No	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Y.1	0,913	0,361	Valid
2	Y.2	0,868	0,361	Valid
3	Y.3	0,873	0,361	Valid
4	Y.4	0,869	0,361	Valid
5	Y.5	0,897	0,361	Valid
6	Y.6	0,885	0,361	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel efektivitas pelayanan publik, seluruh item pernyataan menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur tingkat efektivitas pelayanan publik secara tepat.

Nilai korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa setiap item memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabel efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh item dalam variabel ini dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian yang terdiri dari variabel kemampuan aparat, prosedur pelayanan, sarana prasarana, serta efektivitas pelayanan publik dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

4.1.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang terhadap objek yang sama. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha melalui bantuan program SPSS. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, maka semakin tinggi tingkat konsistensi internal dari instrumen tersebut.

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
X1 (Kemampuan Aparat)	0,925	0,60	Reliabel
X2 (Prosedur Pelayanan)	0,919	0,60	Reliabel
X3 (Sarana Prasarana)	0,943	0,60	Reliabel
Y (Efektivitas Pelayanan Publik)	0,944	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh variabel penelitian, diperoleh nilai Cronbach's Alpha yang berada pada kisaran 0,919 sampai dengan 0,944. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas batas minimum yang disyaratkan yaitu 0,60.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel kemampuan aparat, prosedur pelayanan, sarana prasarana, serta efektivitas pelayanan publik dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

4.1.3.1.3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji ini merupakan salah satu syarat dalam analisis regresi linier berganda agar hasil estimasi tidak bias. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S Test) terhadap nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Nilai
N	80
Test Statistic	0,067
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Monte Carlo Sig.	0,483

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Selain itu, nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,483 juga menunjukkan hasil yang konsisten karena berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini semakin memperkuat bahwa distribusi data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mendukung hasil uji normalitas, dapat dilihat pula statistik residual sebagai berikut:

Tabel 4.10
Statistik Residual

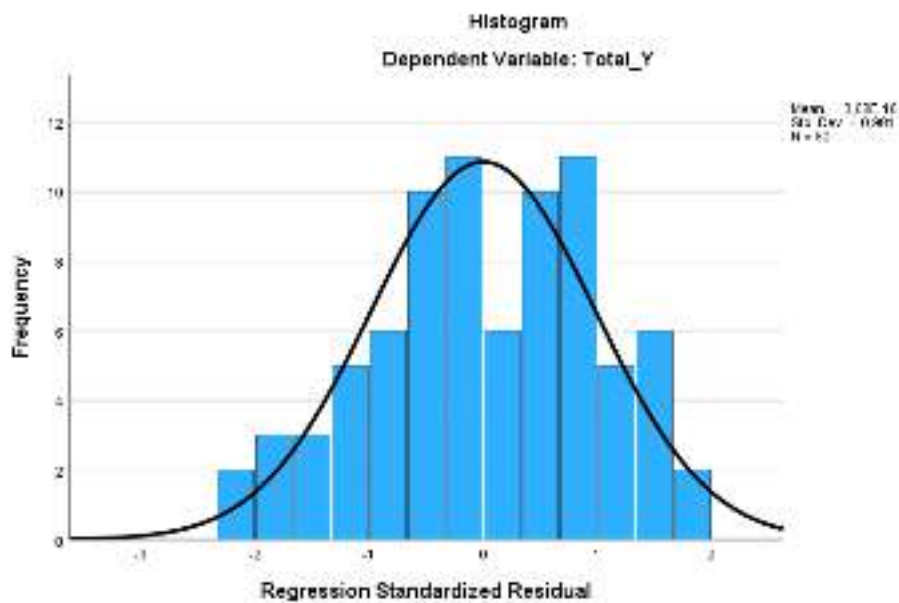
Keterangan	Nilai
Mean Residual	0,000
Std. Deviation	3,664
Std. Residual Min	-2,069
Std. Residual Max	1,945

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai mean residual sebesar 0,000 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi mendekati nol, yang merupakan karakteristik distribusi normal. Selain itu, nilai standardized residual berada pada rentang -2,069 sampai 1,945, yang masih berada dalam batas wajar yaitu antara -3 sampai +3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier ekstrem dalam data penelitian.

Untuk memperkuat hasil uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, penelitian ini juga menggunakan pendekatan grafik, yaitu melalui histogram dan normal probability plot (P-P Plot) dari residual.

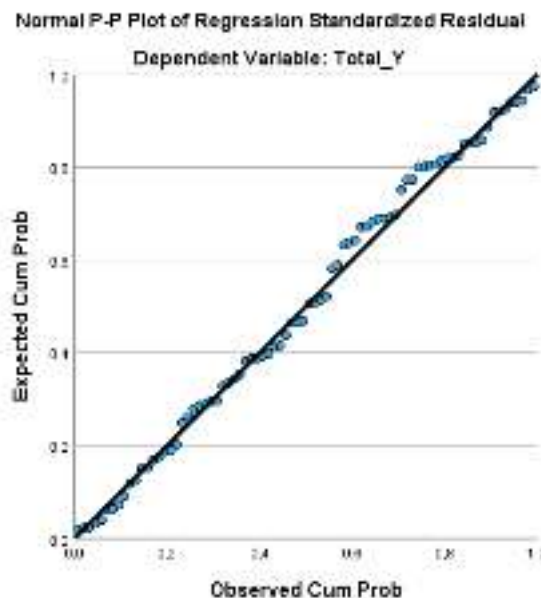
Gambar 4.2
Histogram Uji Normalitas Residual



Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan grafik histogram yang ditampilkan, terlihat bahwa distribusi data residual membentuk pola menyerupai kurva normal (*bell shape*), dimana frekuensi data terkonsentrasi di bagian tengah dan menurun secara bertahap ke kedua sisi. Hal ini menunjukkan bahwa data residual memiliki kecenderungan berdistribusi normal.

Gambar 4.3
P-P Plot Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2026

Selain itu, pada grafik Normal P-P Plot terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal, karena penyebaran data tidak menyimpang jauh dari garis diagonal.

4.1.3.1.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat di antara variabel bebas.

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria yang digunakan adalah:

- a. Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi

multikolinearitas

- b. Jika nilai Tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kemampuan Aparat (X1)	0,932	1,073
Prosedur Pelayanan (X2)	0,955	1,048
Sarana Prasarana (X3)	0,898	1,113

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel kemampuan aparat sebesar 0,932, prosedur pelayanan sebesar 0,955, dan sarana prasarana sebesar 0,898. Seluruh nilai tolerance tersebut lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel juga menunjukkan nilai yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,073 untuk kemampuan aparat, 1,048 untuk prosedur pelayanan, dan 1,113 untuk sarana prasarana. Seluruh nilai VIF tersebut berada jauh di bawah batas maksimum sebesar 10.

Model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung masalah multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat atau tidak terjadi korelasi yang tinggi, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dilanjutkan pada analisis selanjutnya.

4.1.3.2. Analisis Deskriptif Data Penelitian

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap variabel yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4.12
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 (Kemampuan Aparat)	80	10,00	30,00	21,5750	6,00585
X2 (Prosedur Pelayanan)	80	8,00	30,00	20,7000	6,17344
X3 (Sarana Prasarana)	80	7,00	30,00	20,0125	6,63228
Y (Efektivitas Pelayanan Publik)	80	6,00	30,00	20,4375	6,23352

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah disajikan pada tabel sebelumnya, masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik dan kecenderungan jawaban responden. Interpretasi ini dilakukan dengan melihat nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), serta

standar deviasi dari setiap variabel. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang jawaban responden, sedangkan nilai rata-rata digunakan untuk melihat kecenderungan umum penilaian responden terhadap variabel yang diteliti. Sementara itu, standar deviasi digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data atau variasi jawaban responden.

Dengan demikian, melalui analisis ini dapat diketahui bagaimana kondisi masing-masing variabel dalam penelitian, apakah berada pada kategori rendah, sedang, atau tinggi, serta sejauh mana keseragaman atau keberagaman jawaban responden terhadap setiap variabel yang diteliti.

1. Variabel Kemampuan Aparat (X1)

Berdasarkan tabel di atas, variabel kemampuan aparat memiliki nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 21,5750 dengan standar deviasi sebesar 6,00585. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aparat berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang baik terhadap kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan. Standar deviasi sebesar 6,00585 menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data relatif sedang, sehingga jawaban responden memiliki variasi namun masih dalam batas yang wajar.

2. Variabel Prosedur Pelayanan (X2)

Variabel prosedur pelayanan memiliki nilai minimum sebesar 8,00 dan nilai maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata sebesar 20,7000 dengan standar deviasi sebesar 6,17344. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa

prosedur pelayanan berada pada kategori cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai prosedur pelayanan yang ada telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat variasi dalam penilaian yang diberikan. Standar deviasi sebesar 6,17344 menunjukkan adanya penyebaran data yang cukup merata.

3. Variabel Sarana Prasarana (X3)

Variabel sarana prasarana memiliki nilai minimum sebesar 7,00 dan nilai maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata sebesar 20,0125 dengan standar deviasi sebesar 6,63228. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana berada pada kategori cukup memadai. Hal ini berarti bahwa secara umum responden menilai fasilitas yang tersedia sudah cukup mendukung kegiatan pelayanan. Standar deviasi yang relatif lebih besar dibandingkan variabel lain menunjukkan bahwa terdapat variasi jawaban responden yang lebih beragam terhadap kondisi sarana prasarana.

4. Variabel Efektivitas Pelayanan Publik (Y)

Variabel efektivitas pelayanan publik memiliki nilai minimum sebesar 6,00 dan nilai maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata sebesar 20,4375 dengan standar deviasi sebesar 6,23352. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai pelayanan publik yang diberikan telah berjalan dengan cukup efektif. Standar deviasi sebesar 6,23352 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif moderat, sehingga terdapat perbedaan persepsi di antara responden namun tidak terlalu

signifikan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang positif terhadap kemampuan aparat, prosedur pelayanan, sarana prasarana, serta efektivitas pelayanan publik. Selain itu, nilai standar deviasi dari seluruh variabel menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif moderat, sehingga dapat dikatakan bahwa jawaban responden cukup beragam namun masih dalam batas yang wajar.

4.1.3.3. Analisis Verifikatif Data Penelitian

4.1.3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta untuk melihat arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kemampuan aparat (X1), prosedur pelayanan (X2), dan sarana prasarana (X3), sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pelayanan publik (Y).

Pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	-4,568	2,238	-	-2,041
X1 (Kemampuan Aparat)	0,332	0,072	0,320	4,577
X2 (Prosedur Pelayanan)	0,425	0,070	0,421	6,102
X3 (Sarana Prasarana)	0,452	0,067	0,481	6,759

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -4,568 + 0,332X_1 + 0,425X_2 + 0,452X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (*Intercept*)

Nilai konstanta sebesar -4,568 menunjukkan bahwa apabila variabel kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai nol, maka efektivitas pelayanan publik akan bernilai sebesar -4,568. Nilai ini menunjukkan kondisi dasar ketika variabel independen tidak memberikan kontribusi terhadap variabel

dependen.

2. Pengaruh Kemampuan Aparat (X1)

Koefisien regresi variabel kemampuan aparat sebesar 0,332 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kemampuan aparat akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,332 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara kemampuan aparat dan efektivitas pelayanan publik bersifat searah. Artinya, semakin baik kemampuan aparat, maka semakin meningkat pula efektivitas pelayanan publik.

3. Pengaruh Prosedur Pelayanan (X2)

Koefisien regresi variabel prosedur pelayanan sebesar 0,425 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada prosedur pelayanan akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,425 satuan. Nilai ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dimana semakin jelas dan terstruktur prosedur yang diterapkan, maka semakin baik pula hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Pengaruh Sarana Prasarana (X3)

Koefisien regresi variabel sarana prasarana sebesar 0,452 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada sarana prasarana akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,452 satuan. Nilai ini merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan bahwa sarana prasarana memiliki pengaruh paling dominan

dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan nilai koefisien beta (standardized coefficients), dapat diketahui bahwa variabel sarana prasarana (X3) memiliki nilai beta terbesar yaitu 0,481, diikuti oleh prosedur pelayanan (X2) sebesar 0,421, dan kemampuan aparat (X1) sebesar 0,320.

Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan pelayanan publik, dibandingkan dengan faktor lain.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana, memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel independen akan diikuti oleh peningkatan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, variabel sarana prasarana memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.1.3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mewujudkan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, tidak cukup hanya mengandalkan sistem, prosedur, dan mekanisme pelayanan yang telah dirancang dengan baik. Kunci utama keberhasilan pelayanan publik justru terletak pada kualitas dan karakter sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya. Aparatur sebagai pelaksana pelayanan tidak hanya berperan dalam menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki

tanggung jawab strategis sebagai perumus kebijakan, perencana program, pelaksana lapangan, hingga pengawas dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan SDM aparatur yang profesional, bersih dari praktik-praktik tidak etis, dan memiliki wibawa moral menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R	0,809
R Square	0,654
Adjusted R Square	0,641

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,654 menunjukkan bahwa sebesar 65,4 persen variasi efektivitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh variabel kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana. Sedangkan sisanya sebesar 34,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.1.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.15
Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
F hitung	47,982
Sig	0,000

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik.

4.1.3.3.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Menurut Ghozali (2016:101), kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16
Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t hitung	Sig
(Constant)	-4,568	2,238	-	-2,041	0,045
Kemampuan Aparat (X1)	0,332	0,072	0,320	4,577	0,000
Prosedur Pelayanan (X2)	0,425	0,070	0,421	6,102	0,000
Sarana Prasarana (X3)	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452

Sumber: Data diolah, 2026

Uji parsial (uji t) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas pelayanan publik. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Penentuan nilai t tabel dilakukan dengan menggunakan derajat kebebasan (degree of freedom), yaitu $df = n - k$, dimana n merupakan jumlah sampel dan k merupakan jumlah variabel. Berdasarkan jumlah sampel sebanyak 80 responden dan jumlah variabel sebanyak 4, diperoleh df sebesar 76, sehingga nilai t tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 1,991.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Kemampuan Aparat (X1) Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik (Y)

Interpretasi hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan aparat (X1) terhadap efektivitas pelayanan publik (Y). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan korelasi Pearson Product Moment dan analisis regresi linier melalui bantuan program SPSS. Hasil pengolahan data disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17
Uji t Mengenai Pengaruh Kemampuan Aparat terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-4,568	2,238		-2,041	,045
	Total_X1	,332	,072	,320	4,577	<,001
	Total_X2	,425	,070	,421	6,102	<,001
	Total_X3	,452	,067	,481	6,759	<,001

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hubungan antara variabel kemampuan aparat (X1) dengan efektivitas pelayanan publik (Y) yang dihitung menggunakan koefisien korelasi adalah sebesar 0,422. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara kemampuan aparat dengan efektivitas pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan aparat memiliki peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi tingkat efektivitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kemampuan aparat terhadap efektivitas pelayanan publik, dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut:

$$KD = (0,422)^2 \times 100\% = 17,8\%$$

Artinya, efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kemampuan aparat sebesar 17,8%, sedangkan sisanya sebesar 82,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kebijakan organisasi, sistem pelayanan, kepemimpinan, serta faktor eksternal lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji regresi yang ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel kemampuan aparat adalah sebesar 4,577 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Untuk menentukan nilai t tabel digunakan derajat kebebasan (degree of freedom), yaitu $df = n - k$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh $df = 80 - 4 = 76$, sehingga nilai t tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 1,991.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,577 > 1,991$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan, yaitu kemampuan aparat berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan publik, dapat diterima atau teruji kebenarannya.

Semakin tinggi kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dalam memberikan pelayanan, maka akan semakin meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Sebaliknya, apabila kemampuan aparat rendah, maka efektivitas pelayanan publik cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Pengaruh Prosedur Pelayanan (X2) terhadap Efektivitas Pelayanan Publik (Y)

Untuk melihat bagaimana peran prosedur pelayanan terhadap efektivitas pelayanan publik, dilakukan pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda yang didukung dengan uji parsial (uji t). Hasil pengolahan data melalui

SPSS disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Uji t Pengaruh Prosedur Pelayanan terhadap Efektivitas Pelayanan Publik
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,568	2,238		-2,041	0,045
Prosedur Pelayanan (X2)	0,425	0,070	0,421	6,102	0,000

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel prosedur pelayanan memiliki nilai t hitung sebesar 6,102 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh prosedur pelayanan terhadap efektivitas pelayanan publik bersifat signifikan secara statistik.

Nilai t hitung yang diperoleh juga lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,991, yang dihitung berdasarkan derajat kebebasan ($df = 80 - 4 = 76$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel prosedur pelayanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap efektivitas pelayanan publik. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,425 menunjukkan bahwa setiap peningkatan

dalam kualitas prosedur pelayanan akan diikuti oleh peningkatan efektivitas pelayanan publik. Hal ini mencerminkan bahwa kejelasan alur pelayanan, kemudahan akses, serta konsistensi dalam pelaksanaan prosedur merupakan faktor penting dalam mendukung terciptanya pelayanan yang efektif.

Berdasarkan hasil analisis korelasi sebelumnya, hubungan antara prosedur pelayanan dengan efektivitas pelayanan publik memiliki nilai sebesar 0,502, yang berada pada kategori hubungan sedang menuju kuat. Hal ini memperkuat temuan bahwa prosedur pelayanan tidak hanya memiliki hubungan yang cukup erat, tetapi juga berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kontribusi variabel prosedur pelayanan terhadap efektivitas pelayanan publik dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 25,2%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian variasi dalam efektivitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh prosedur pelayanan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa prosedur pelayanan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dinyatakan diterima.

3. Pengaruh Sarana Prasarana (X3) terhadap Efektivitas Pelayanan Publik (Y)

Untuk mengetahui pengaruh prosedur pelayanan terhadap efektivitas pelayanan publik, dilakukan pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan uji parsial (uji t). Hasil pengolahan data

menggunakan program SPSS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Uji t Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Efektivitas Pelayanan Publik
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,568	2,238		-2,041	0,045
Prosedur Pelayanan (X2)	0,425	0,070	0,421	6,102	0,000

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel prosedur pelayanan memiliki nilai t hitung sebesar 6,102 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh prosedur pelayanan terhadap efektivitas pelayanan publik bersifat signifikan secara statistik.

Nilai t hitung yang diperoleh juga lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,991, yang dihitung berdasarkan derajat kebebasan ($df = 80 - 4 = 76$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel prosedur pelayanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap efektivitas pelayanan publik. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,425 menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam kualitas prosedur pelayanan akan diikuti oleh peningkatan efektivitas pelayanan publik. Hal ini mencerminkan bahwa kejelasan alur pelayanan,

kemudahan akses, serta konsistensi dalam pelaksanaan prosedur merupakan faktor penting dalam mendukung terciptanya pelayanan yang efektif.

Berdasarkan hasil analisis korelasi sebelumnya, hubungan antara prosedur pelayanan dengan efektivitas pelayanan publik memiliki nilai sebesar 0,502, yang berada pada kategori hubungan sedang menuju kuat. Hal ini memperkuat temuan bahwa prosedur pelayanan tidak hanya memiliki hubungan yang cukup erat, tetapi juga berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kontribusi variabel prosedur pelayanan terhadap efektivitas pelayanan publik dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 25,2%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian variasi dalam efektivitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh prosedur pelayanan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Dengan memperhatikan seluruh hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa prosedur pelayanan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dinyatakan diterima.

4. Pengaruh Kemampuan Aparat (X1), Prosedur Pelayanan (X2), dan Sarana Prasarana (X3) terhadap Efektivitas Pelayanan Publik (Y)

Interpretasi hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kemampuan aparat (X1), prosedur pelayanan (X2), dan sarana prasarana (X3) terhadap efektivitas pelayanan publik (Y). Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan program SPSS. Hasil

pengolahan data disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Pengaruh Kemampuan Aparat, Prosedur Pelayanan, dan Sarana Prasarana terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,782	0,611	0,597	3,664

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,782. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana secara bersama-sama dengan efektivitas pelayanan publik berada pada kategori kuat.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,611 menunjukkan bahwa sebesar 61,1% variasi efektivitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana. Sementara itu, sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kebijakan organisasi, budaya kerja, maupun faktor eksternal lainnya yang tidak diteliti.

Tabel 4.21
Uji F Pengaruh Kemampuan Aparat, Prosedur Pelayanan, dan Sarana Prasarana terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	643,521	3	214,507	47,982	0,000
Residual	339,279	76	4,463		
Total	982,800	79			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelayanan Publik

b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 47,982 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,72 ($df_1 = 3$ dan $df_2 = 76$), maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar ($47,982 > 2,72$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik.

Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak dapat dipisahkan dalam menjelaskan efektivitas pelayanan publik. Kemampuan aparat yang baik perlu didukung oleh prosedur pelayanan yang jelas serta sarana prasarana yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik secara bersama-sama dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai F hitung sebesar 47,982 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai F tabel dengan derajat kebebasan (dk) yaitu $df_1 = 3$ dan $df_2 = 76$ adalah sebesar 2,72. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($47,982 > 2,72$).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Artinya, secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan aparat (X1), prosedur pelayanan (X2), dan sarana prasarana (X3) terhadap efektivitas pelayanan publik (Y).

Berdasarkan hasil pengujian regresi dan analisis sebelumnya, maka dapat disusun matriks jalur sebagai berikut:

$$\rho_{YX1} = 0,320$$

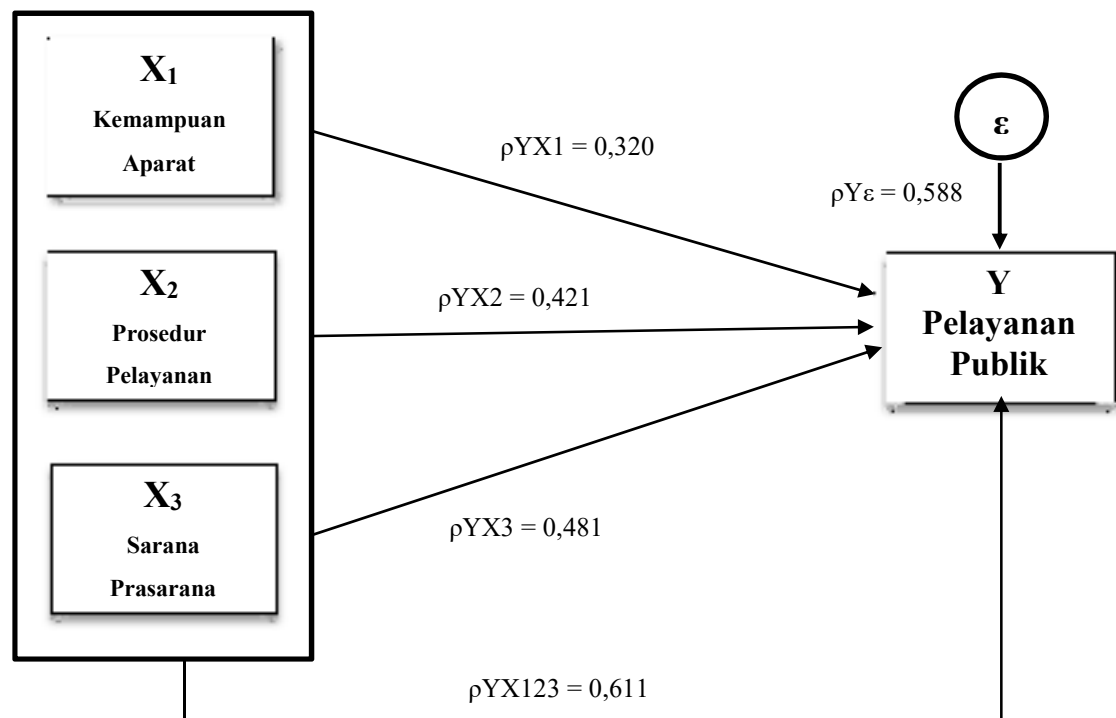
$$\rho_{YX2} = 0,421$$

$$\rho_{YX3} = 0,481$$

$$\rho_{YX123} = 0,611$$

$$\rho_{Y\varepsilon} = 0,588$$

Gambar 4.4
Matriks Jalur



Tabel 4.22
Koefisien Jalur dan Interpretasi

Koefisien Jalur	Keterangan
$\rho_{YX1} = 0,320$	Koefisien jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh kemampuan aparat (X1) terhadap efektivitas pelayanan publik (Y).
$\rho_{YX2} = 0,421$	Koefisien jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh prosedur pelayanan (X2) terhadap efektivitas pelayanan publik (Y).
$\rho_{YX3} = 0,481$	Koefisien jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh sarana prasarana (X3) terhadap efektivitas pelayanan publik (Y).
$\rho_{YX123} = 0,611$	Koefisien determinasi yang menunjukkan besarnya pengaruh kemampuan aparat (X1), prosedur pelayanan (X2), dan sarana prasarana (X3) secara simultan terhadap efektivitas pelayanan publik (Y).
$\rho_{Y\varepsilon} = 0,588$	Koefisien jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel lain di luar model penelitian terhadap efektivitas pelayanan publik (Y).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Analisis Deskriptif

Untuk memperjelas hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, berikut disajikan rekapitulasi nilai rata-rata (mean) dari masing-masing variabel penelitian sebagai dasar dalam melakukan interpretasi lebih lanjut.

Tabel 4.23
Rekapitulasi Nilai Rata-rata Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Kategori
Kemampuan Aparat (X1)	21,5750	Cukup Tinggi
Prosedur Pelayanan (X2)	20,7000	Cukup Tinggi
Sarana Prasarana (X3)	20,0125	Cukup Tinggi
Efektivitas Pelayanan Publik (Y)	20,4375	Cukup Tinggi

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan rekapitulasi nilai rata-rata tersebut, seluruh variabel penelitian berada pada kategori cukup tinggi. Temuan ini mencerminkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang relatif positif terhadap kondisi variabel yang diteliti, baik yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, mekanisme pelayanan, maupun hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Ghozali (2016) yang menyatakan bahwa analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai rata-rata dan tingkat penyebaran data. Oleh karena itu, nilai mean yang berada pada kategori cukup tinggi menunjukkan bahwa secara umum kondisi variabel dalam penelitian ini telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat optimal.

Apabila ditinjau lebih rinci, variabel kemampuan aparat memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa

aparatus dinilai telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman kerja yang mendukung kelancaran proses pelayanan. Namun demikian, nilai standar deviasi yang relatif besar menunjukkan bahwa masih terdapat variasi penilaian di antara responden, sehingga dapat diindikasikan bahwa tingkat kemampuan aparat belum sepenuhnya merata.

Variabel prosedur pelayanan juga menunjukkan nilai rata-rata yang berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa prosedur pelayanan yang diterapkan telah memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. Kejelasan alur pelayanan dan kemudahan akses menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, adanya variasi dalam jawaban responden mengindikasikan bahwa implementasi prosedur pelayanan di lapangan belum sepenuhnya konsisten, sehingga pengalaman pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat masih beragam.

Pada variabel sarana prasarana, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan kategori cukup tinggi, namun merupakan yang terendah dibandingkan variabel lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelayanan publik sudah cukup memadai, tetapi belum optimal. Tingginya variasi jawaban responden menunjukkan bahwa persepsi terhadap sarana prasarana masih berbeda-beda, yang dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman dalam mengakses fasilitas pelayanan atau adanya ketimpangan kualitas sarana di masing-masing unit pelayanan. Sementara itu, variabel efektivitas pelayanan publik sebagai variabel dependen juga menunjukkan nilai rata-rata dalam kategori cukup

tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cukup efektif. Efektivitas pelayanan tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini memberikan gambaran bahwa kondisi pelayanan publik dalam penelitian ini berada pada tingkat yang cukup baik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, khususnya dalam menjaga konsistensi pelayanan di seluruh unit kerja. Variasi penilaian responden yang masih terlihat pada setiap variabel menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kemampuan aparat, penyempurnaan prosedur pelayanan, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan merata.

4.2.2 Pembahasan Analisis Verifikatif

4.2.2.1 Pengaruh Kemampuan Aparat terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kemampuan aparat (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik (Y). Hal ini tercermin dari nilai t hitung sebesar 4,577 yang lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,991, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan aparat merupakan salah satu faktor yang

berperan penting dalam menentukan tingkat efektivitas pelayanan publik.

Secara substantif, kemampuan aparat tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknis dalam melaksanakan tugas, tetapi juga mencakup aspek pemahaman terhadap prosedur kerja, ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Aparat yang memiliki kemampuan yang memadai akan lebih mampu mengelola proses pelayanan secara sistematis dan responsif, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan kemampuan aparat berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas hasil pelayanan. Hal ini dapat dipahami karena aparat yang kompeten cenderung mampu meminimalisir kesalahan dalam proses pelayanan, mempercepat waktu penyelesaian layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas individu yang menjalankan sistem tersebut.

Apabila dikaitkan dengan perspektif teoritis, hasil ini sejalan dengan pandangan Notoatmodjo (2009) yang menyatakan bahwa kemampuan individu merupakan hasil dari proses pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu, Sedarmayanti (2017) juga menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang erat dengan kinerja organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, kemampuan aparat menjadi salah satu determinan utama dalam menciptakan pelayanan yang efektif dan

berkualitas.

Meskipun hasil analisis menunjukkan pengaruh yang signifikan, nilai koefisien yang diperoleh tidak sepenuhnya dominan dibandingkan variabel lain dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparat memang penting, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas pelayanan publik. Dengan kata lain, kemampuan aparat perlu didukung oleh faktor lain seperti kejelasan prosedur pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana agar dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Di sisi lain, variasi jawaban responden yang masih terlihat dalam analisis deskriptif sebelumnya mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan aparat belum sepenuhnya merata. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun intensitas pelatihan yang diterima oleh masing-masing aparat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan aparat tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi perlu dirancang secara sistematis melalui program pelatihan, pembinaan, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan aparat memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur, baik melalui penguatan kompetensi teknis maupun pengembangan soft skills, menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh instansi terkait. Dengan aparatur yang kompeten, pelayanan publik tidak hanya dapat berjalan secara efisien, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

4.2.2.2 Pengaruh Prosedur Pelayanan terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel prosedur pelayanan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,102 yang melampaui nilai t tabel sebesar 1,991, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Kondisi ini menegaskan bahwa prosedur pelayanan merupakan elemen yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Jika ditelaah lebih dalam, prosedur pelayanan berkaitan erat dengan bagaimana suatu layanan dirancang, disusun, dan dilaksanakan secara sistematis. Prosedur yang jelas, sederhana, serta mudah dipahami akan membantu masyarakat dalam mengakses layanan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Sebaliknya, prosedur yang berbelit-belit justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan memperlambat proses pelayanan. Oleh karena itu, keberadaan prosedur yang efektif menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik prosedur pelayanan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena prosedur yang terstruktur dengan baik akan menciptakan alur pelayanan yang lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan kejelasan informasi yang diterima oleh pengguna layanan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara lebih cepat, tepat, dan transparan.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Sinambela (2016) yang menyatakan

bahwa pelayanan publik yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kejelasan sistem dan prosedur yang digunakan dalam proses pelayanan. Prosedur yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparat, tetapi juga sebagai bentuk kepastian layanan bagi masyarakat. Selain itu, menurut Tjiptono (2012), kemudahan prosedur dan kejelasan alur pelayanan merupakan bagian penting dari dimensi kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Hasil analisis deskriptif sebelumnya menunjukkan adanya variasi persepsi responden terhadap prosedur pelayanan yang diterapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, implementasi prosedur pelayanan belum sepenuhnya konsisten di seluruh unit pelayanan. Perbedaan pemahaman aparat terhadap prosedur atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Selain itu, pengaruh prosedur pelayanan yang cukup besar dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sistem pelayanan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif. Namun demikian, prosedur pelayanan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh kemampuan aparat yang memadai serta sarana prasarana yang mendukung. Dengan kata lain, efektivitas pelayanan merupakan hasil dari keterpaduan antara sistem, sumber daya manusia, dan fasilitas yang tersedia.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, instansi terkait perlu melakukan evaluasi dan penyederhanaan prosedur pelayanan secara berkala, serta memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh

seluruh aparat pelayanan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2.2.3 Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel sarana prasarana (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 6,759 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,991, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan sarana prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menunjang efektivitas pelayanan publik.

Berbeda dengan variabel sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek sumber daya manusia dan sistem, sarana prasarana berperan sebagai faktor pendukung yang bersifat fisik namun memiliki dampak langsung terhadap kelancaran proses pelayanan. Ketersediaan fasilitas yang memadai, kondisi lingkungan pelayanan yang nyaman, serta kelengkapan peralatan kerja akan sangat mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sarana prasarana memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Hal ini dapat dipahami karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelayanan publik akan sulit berjalan secara optimal, meskipun didukung oleh aparat yang kompeten dan prosedur yang baik. Dengan kata lain, sarana prasarana menjadi fondasi operasional yang memungkinkan seluruh proses pelayanan dapat terlaksana secara efektif.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2017) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kinerja organisasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, menurut Moenir (2010), fasilitas pelayanan yang memadai akan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Dalam konteks empiris, variasi penilaian responden terhadap sarana prasarana yang terlihat pada analisis deskriptif sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas fasilitas pelayanan belum sepenuhnya merata. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan ketersediaan fasilitas antar unit pelayanan atau belum optimalnya pemeliharaan sarana yang ada. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa peningkatan kualitas sarana prasarana masih perlu menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, dominannya pengaruh sarana prasarana dalam penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa masyarakat sangat memperhatikan aspek fisik dalam menilai kualitas pelayanan. Lingkungan pelayanan yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta kemudahan akses menjadi faktor yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi persepsi terhadap efektivitas pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan aparat dan perbaikan prosedur, tetapi juga harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Tanpa

dukungan fasilitas yang baik, kualitas pelayanan publik akan sulit mencapai tingkat yang optimal.

4.2.2.4 Pengaruh Kemampuan Aparat, Prosedur Pelayanan, dan Sarana

Prasarana terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa kemampuan aparat (X1), prosedur pelayanan (X2), dan sarana prasarana (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 47,982 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,72, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,611 menunjukkan bahwa sebesar 61,1% variasi efektivitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga variabel independen dalam penelitian ini. Sementara itu, sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti. Angka ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat dalam menggambarkan fenomena pelayanan publik yang diteliti.

Secara konseptual, hasil ini memperlihatkan bahwa efektivitas pelayanan publik merupakan hasil dari interaksi yang saling melengkapi antara kualitas sumber daya manusia, kejelasan sistem pelayanan, dan dukungan fasilitas yang memadai. Kemampuan aparat sebagai pelaksana pelayanan akan lebih optimal apabila didukung oleh prosedur pelayanan yang jelas dan sarana prasarana yang

memadai. Sebaliknya, tanpa adanya integrasi antara ketiga faktor tersebut, pelayanan publik cenderung berjalan tidak efektif meskipun salah satu aspek telah terpenuhi dengan baik.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pelayanan publik tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh. Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik yang efektif merupakan hasil dari sinergi antara berbagai komponen yang saling berkaitan, termasuk sumber daya manusia, sistem pelayanan, dan fasilitas pendukung. Selain itu, Sedarmayanti (2017) juga menegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik dalam memberikan pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki secara terpadu.

Dalam konteks penelitian ini, meskipun masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial, hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan secara bersama-sama jauh lebih kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan memperbaiki satu aspek saja, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Di sisi lain, masih adanya persentase pengaruh dari variabel lain di luar model penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal lainnya, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen kerja, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun ketiga variabel yang diteliti memiliki kontribusi yang signifikan, namun pengembangan pelayanan publik tetap memerlukan pendekatan yang lebih

luas.

Kemampuan aparat, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana secara simultan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara terpadu, melalui pengembangan kompetensi aparatur, penyempurnaan sistem pelayanan, serta penyediaan fasilitas yang memadai dan berkelanjutan, sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.